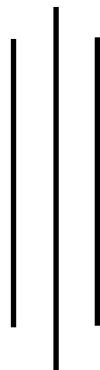




**RANCANGAN AKHIR**

**RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2024**

**DINAS KOPERASI, UKM DAN**  
**PERDAGANGAN**  
**KOTA PEMATANGSIANTAR**



**PEMERINTAH KOTA**  
**PEMATANGSIANTAR**  
**TAHUN 2023**



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

Jalan Cempaka No. 2 Pematangsiantar 21113  
Telp/Fax: (0622) 23766 Email: disperindagps@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN  
KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR: 900.11.1 /215 /DKUP/ II /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2024  
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN  
KOTA PEMATANGSIANTAR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2024 dalam Keputusan Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;  
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM;  
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
9. Peraturan .....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, untuk:
1. Menyusun Rancangan Awal Renja Tahun 2024;
  2. Menyempurnakan Rancangan Renja Tahun 2024;
  3. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
  4. Menyusun Rancangan Renja Tahun 2024;
  5. Menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2024;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematangsiantar  
Pada Tanggal : 21 FEBRUARI 2023

Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Kota Pematangsiantar

  
**HERBET ARUAN, S.Pd, MHI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710215 199305 1 001

**LAMPIRAN I**

**NOMOR** : 900.1.1.1 / 215 / DKUP / 11 / 2023

**TANGGAL** : 21 FEBRUARI 2023

**TENTANG** : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2024 DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2023**

**SUSUNAN PERSONALIA**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2024**

**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN**

**KOTA PEMATANGSIANTAR**

**TAHUN 2023**

**I. TIM PENGARAH**

**Pengarah** : Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN  
**Penanggungjawab** : SEKRETARIS DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN  
**Ketua** : KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM & KEUANGAN  
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN  
**Sekretaris** : ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
**Anggota** : 1. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN  
2. KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN  
3. KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM  
4. KEPALA UPTD DANA BERGULIR  
5. KEPALA UPTD METROLOGI  
**Kesekretariatan** : PENYUSUN LAPORAN DAN EVALUASI

Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Kota Pematangsiantar



**HERBET ARUAN, S.Pd, MH**

Pembina Tk. I

NIP. 19710215 199305 1 001

**LAMPIRAN II**

**NOMOR** : 900.1.1.1 / 215 / DKUP / II / 2023

**TANGGAL** : 21 FEBRUARI 2023

**TENTANG** : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2024 DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2023**

**RINCIAN TUGAS  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2024  
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN  
KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2023**

**1. Pengarah, yaitu:**

- a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024;
- b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Rencana Kerja (RENJA) 2024;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan perkembangan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 kepada Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.

**2. Penanggung Jawab**

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan;
- b. Membantu Pengarah dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan;
- c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

**3. Ketua**

- a. Mengkoordinasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2023;
- b. Membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2023;
- c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2023.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIt. KEPALA DINAS  
KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN  
KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR : 900.1.1.17 215 /DKUP/II /2023  
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN  
KOTA PEMATANGSIANTAR

No	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2.	Sekretaris	Ka. Subag Penyusun Program dan Keuangan
3.	Anggota	a. Kepada Bidang Perdagangan b. Kepada Bidang Perindustrian c. Kepala Bidang Koperasi dan UKM d. Kepala UPTD Dana Bergulir e. Kepala UPTD Metrologi

PIt. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN  
PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR



HERBET ARUAN, S.Pd, MH  
PEMBINA Tk I  
NIP. 19710215 199305 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Pematangsiantar yang mempunyai Tugas dan Fungsi serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Koperasi, Perdagangan dan Perindustri di wilayah Kota Pematangsiantar. Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar berisi kebijakan pembangunan yang terkait langsung dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar 2022 - 2027, Dokumen RKPD, Renja Provinsi dan Renja Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan koperasi, perdagangan dan industri. Isi dokumen diawali dengan evaluasi terhadap hasil atau capaian dari program kegiatan serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya dalam perkembangannya dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang hendak ditingkatkan dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2024. Pembangunan koperasi, perdagangan dan industri di Kota Pematangsiantar dilaksanakan berdasar pada Visi Misi Walikota Pematangsiantar yang mengacu pada RKPD dan Renstra. Rencana Kerja Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta kondisi riil permasalahan dan isu strategis tentang koperasi, perdagangan dan industri yang ada di Kota Pematangsiantar. Selanjutnya dokumen perencanaan ini akan menjadi bahan Penyempurnaan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2024 menjadi Rancangan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2024 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan dan Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar. Sistematisa penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2024 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2024 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 ke depan.

Pematangsiantar, Mei 2023

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil  
Menengah dan Perdagangan  
Kota Pematangsiantar

**HERBET ARUAN, S.Pd., MH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19710215 199305 1 001**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>LAMPIRAN : MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
1.4. SISTIMATIKA PENULISAN.....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	35
2.4. Review Terhadap RKPD .....	37
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	57
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN</b> .....	59
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	59
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	63
3.3. Program dan Kegiatan .....	63
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	98
<b>BAB IV P E N U T U P</b> .....	100

## **LAMPIRAN : MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024**

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 2. 1 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PEMATANGSIANTAR.....</b>	<b>7</b>
<b>TABEL 2. 2 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA ...</b>	<b>15</b>
<b>TABEL 2. 3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR.....</b>	<b>32</b>
<b>TABEL 2. 4 PERMASALAHAN DAN HAMBATAN.....</b>	<b>35</b>
<b>TABEL 2. 5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR.....</b>	<b>38</b>
<b>TABEL 2. 6 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN 2024 KOTA PEMATANG SIANTAR</b>	<b>58</b>
<b>TABEL 3. 1 RENCANA KERJA .....</b>	<b>66</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta memperhatikan sinkronisasi dengan Perencanaan ditingkat Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat.

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar didasarkan kepada pendekatan Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System) dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang dipandang sebagai instrument bagi pelembagaan pelayananan partisipatif.

Dalam penyusunan RENJA ini, landasan hukum RENJA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;  
Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012 - 2032;
22. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. MAKSUD**

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai bahan/masukan bagi penyusunan Renja dan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2024. Pembahasan Renja dan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2024 dilakukan melalui Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya, RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2024 hasil Musrenbang tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar.

#### **1.3.2. TUJUAN**

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar adalah:

- a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematang Siantar sebagai institusi pembangunan ekonomi dalam mencapai target pencapaian Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kota Tahun 2022-2027;
- b. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang dalam pencapaian Visi dan Misi;
- c. RENJA diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja dan dievaluasi secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;

- d. RENJA diharapkan sebagai pemacu seluruh jajaran organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam menghasilkan rencana yang lebih aspiratif dan aplikatif;
- e. RENJA sebagai landasan operasional dalam penyusunan program kegiatan yang mengacu pada visi dan misi Kota Pematang Siantar;
- f. Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD), pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan SKPD, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP).

#### **1.4. SISTIMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

###### **TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan RENJA PERANGKAT DAERAH tahun lalu dalam capaian RENSTRA PERANGKAT DAERAH
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penalaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

##### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB IV : PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dalam memberikan pelayanan kepada para pengusaha Industri Kecil, menengah, dan industri besar banyak mengalami hambatan – hambatan dan untuk menyelesaikan hambatan – hambatan tersebut diselesaikan atau dilaksanakan dengan melalui pendekatan dan kebijakan – kebijakan yang turut melibatkan Pelaku Usaha, masyarakat dan Instansi terkait, kemudian hambatan – hambatan tersebut dijadikan sebagai pendorong dan peluang untuk mencapai realisasi program yang dicanangkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai.

##### **2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022**

Evaluasi Pelaksanaan Renja dilakukan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2022.

A. Realisasi fisik dan keuangan dari program /kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2022 adalah:



**TABEL 2. 1**  
**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022**

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	SILPA	%
					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		<b>11.410.035.460</b>	<b>10.273.610.514</b>	<b>1.136.424.946</b>	<b>90,04</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>6.284.279.717</b>	<b>5.725.184.237</b>	<b>559.095.480</b>	<b>91,10</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>02.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>83.299.671</b>	<b>78.804.905</b>	<b>4.494.766</b>	<b>94,60</b>
2	17	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAU	49.039.718	45.871.366	3.168.352	93,54
2	17	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU	34.259.953	32.933.539	1.326.414	96,13
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>02.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>4.836.981.807</b>	<b>4.430.871.639</b>	<b>406.110.168</b>	<b>91,60</b>
2	17	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	4.805.460.850	4.406.098.046	399.362.804	91,69
2	17	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DAU	31.520.957	24.773.593	6.747.364	78,59
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>02.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>582.570.919</b>	<b>464.795.254</b>	<b>117.775.665</b>	<b>79,78</b>
2	17	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	10.996.054	9.843.120	1.152.934	89,52
2	17	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	198.336.479	173.334.321	25.002.158	87,39
2	17	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DAU				

							16.560.786	11.733.461	4.827.325	70,85
2	17	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DAU	15.000.000	14.455.530	544.470	96,37
2	17	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DAU	53.995.200	49.535.325	4.459.875	91,74
2	17	1	02.06	9	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	287.682.400	205.893.497	81.788.903	71,57
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>02.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>329.512.320</b>	<b>309.235.079</b>	<b>20.277.241</b>	<b>93,85</b>
2	17	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	5.997.200	5.990.660	6.540	<b>99,89</b>
2	17	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	35.685.120	28.960.846	6.724.274	81,16
2	17	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	27.900.000	27.000.000	900.000	96,77
2	17	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	259.930.000	247.283.573	12.646.427	95,13
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>02.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>451.915.000</b>	<b>441.477.360</b>	<b>10.437.640</b>	<b>97,69</b>
2	17	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	76.640.000	76.410.660	229.340	99,70
2	17	1	02.09	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DAU	375.275.000	365.066.700	10.208.300	97,28
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>411.796.041</b>	<b>363.692.576</b>	<b>48.103.465</b>	<b>88</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>02.01</b>		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, TeraUlang dan Pengawasan</b>		<b>411.796.041</b>	<b>363.692.576</b>	<b>48.103.465</b>	<b>88,32</b>
3	30	6	02.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, TeraUlang	DAU	386.805.541	343.746.011	43.059.530	88,87
3	30	6	02.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	DAU	24.990.500	19.946.565	5.043.935	79,82
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI</b>		<b>466.313.524</b>	<b>427.993.942</b>	<b>38.319.582</b>	<b>91,78</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>02.01</b>		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>466.313.524</b>	<b>427.993.942</b>	<b>38.319.582</b>	<b>91,78</b>

2	17	3	02.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DAK NON FISIK	466.313.524	427.993.942	38.319.582	91,78
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		<b>170.170.000</b>	<b>159.729.932</b>	<b>10.440.068</b>	<b>93,86</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>02.01</b>		<b>Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/ kota</b>		<b>170.170.000</b>	<b>159.729.932</b>	<b>10.440.068</b>	<b>93,86</b>
2	17	5	02.01	1	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemadirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangankab/ kota	DAU	170.170.000	159.729.932	10.440.068	93,86
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>		<b>51.464.318</b>	<b>47.374.730</b>	<b>4.089.588</b>	<b>92,05</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>02.01</b>		<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>51.464.318</b>	<b>47.374.730</b>	<b>4.089.588</b>	<b>92,05</b>
2	17	6	02.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	DAU	51.464.318	47.374.730	4.089.588	92,05
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>7</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		<b>65.351.223</b>	<b>49.044.773</b>	<b>16.306.450</b>	<b>75,05</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>02.01</b>		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		<b>65.351.223</b>	<b>49.044.773</b>	<b>16.306.450</b>	<b>75,05</b>
2	17	7	02.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DAU	65.351.223	49.044.773	16.306.450	75,05
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>8</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		<b>230.301.475</b>	<b>210.998.299</b>	<b>19.303.176</b>	<b>91,62</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>02.01</b>		<b>Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil</b>		<b>230.301.475</b>	<b>210.998.299</b>	<b>19.303.176</b>	<b>91,62</b>

2	17	8	02.01	1	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	DAU	230.301.475	210.998.299	19.303.176	91,62
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		<b>42.629.751</b>	<b>39.913.165</b>	<b>2.716.586</b>	<b>93,63</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>02.06</b>		<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>42.629.751</b>	<b>39.913.165</b>	<b>2.716.586</b>	<b>93,63</b>
3	30	2	02.06	1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	DAU	42.629.751	39.913.165	2.716.586	93,63
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>495.588.840</b>	<b>457.223.896</b>	<b>38.364.944</b>	<b>92,26</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>02.01</b>		<b>Pembangunan dan Pengolahan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>399.826.740</b>	<b>390.545.570</b>	<b>9.281.170</b>	<b>97,68</b>
3	30	3	02.01	2	Fasilitasi Pengolahan Sarana Distribusi Perdagangan	DAU	399.826.740	390.545.570	9.281.170	97,68
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>02.02</b>		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>		<b>95.762.100</b>	<b>66.678.326</b>	<b>29.083.774</b>	<b>69,63</b>
3	30	3	02.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	DAU	95.762.100	66.678.326	29.083.774	69,63
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>234.728.864</b>	<b>167.350.573</b>	<b>67.378.291</b>	<b>71,30</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>02.02</b>		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>234.728.864</b>	<b>167.350.573</b>	<b>67.378.291</b>	<b>71,30</b>
3	30	4	02.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	DAU	73.881.240	52.234.300	21.646.940	70,70
3	30	4	02.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	DAU	160.847.624	115.116.273	45.731.351	71,57
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>240.983.218</b>	<b>215.172.731</b>	<b>25.810.487</b>	<b>89,29</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>02.01</b>		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk</b>		<b>240.983.218</b>	<b>215.172.731</b>	<b>25.810.487</b>	<b>89,29</b>

					<b>Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					
3	30	5	02.01	2	Pameran Dagang Nasional	DAU	240.983.218	215.172.731	25.810.487	89,29
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>7</b>			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		<b>535.955.164</b>	<b>471.228.159</b>	<b>64.727.005</b>	<b>87,92</b>
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>02.01</b>		<b>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota</b>		<b>535.955.164</b>	<b>471.228.159</b>	<b>64.727.005</b>	<b>87,92</b>
3	30	7	02.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	DAU	535.955.164	471.228.159	64.727.005	87,92
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>7</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>2.138.040.512</b>	<b>1.903.293.471</b>	<b>234.747.041</b>	<b>89,02</b>
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>02.01</b>		<b>PENYUSUNAN, PENERAPAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>		<b>2.138.040.512</b>	<b>1.903.293.471</b>	<b>234.747.041</b>	<b>89,02</b>
3	31	2	02.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	DAU	78.995.335	70.610.590	8.384.745	89,39
3	31	2	02.01	4	Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	DAU	550.362.000	350.263.035	200.098.965	63,64
3	31	2	02.01	5	Koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	DAU & DBH-CHT	1.508.683.177	1.482.419.846	26.263.331	98,26
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>42.432.813</b>	<b>35.410.030</b>	<b>7.022.783</b>	<b>83,45</b>
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>02.01</b>		<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>42.432.813</b>	<b>35.410.030</b>	<b>7.022.783</b>	<b>83,45</b>
3	31	4	02.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	DAU	42.432.813	35.410.030	7.022.783	83,45

**1. Realisasi program/kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2022 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tidak ada program yang tidak memenuhi target kinerja.

**2. Realisasi program/kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan**

Berdasarkan tabel realisasi program/kegiatan tahun 2022 tersebut diatas terlihat bahwa ada beberapa program/kegiatan yang telah memenuhi target yang telah direncanakan, yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan dengan realisasi sebesar 91,10%
2. Program standarisasi dan perlindungan konsumen dengan realisasi sebesar 88,32%
3. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan realisasi sebesar 93,86%
4. Program pendidikan dan Latihan koperasi dengan realisasi sebesar 91,78%
5. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan realisasi sebesar 92,05%
6. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dengan realisasi sebesar 75,05%
7. Program Pengembangan UMKM dengan realisasi sebesar 91,12%
8. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan realisasi sebesar 93,63 %
9. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan realisasi sebesar 92,26%
10. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan realisasi sebesar 71,30%
11. Program pengembangan ekspor dengan realisasi sebesar 89,29%
12. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan realisasi sebesar 87,92%
13. Program perencanaan dan pembangunan industry dengan realisasi sebesar 94,07 %

14. Program pengelolaan sistem informasi industry nasional dengan realisasi sebesar 83,45 %

**3. Realisasi program/kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pada tahun 2022, realisasi program/kegiatan tidak ada yang melebihi target. Semua kegiatan terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan.

**4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.**

Secara fisik realisasi program kegiatan sudah mencapai di atas rata-rata 90% namun untuk realisasi keuangan program kegiatan tidak mencapai target, hal ini karena disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu.

**5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD**

Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Koperasi, UMKM Kota Pematangsiantar.

**6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut**

Untuk Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

- a. Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas.
- b. Merencanakan target fisik dan keuangan maksimal pada tahunsebelumnya.

B. Realisasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja disajikan sebagaimana dalam Tabel T-C.29 di bawah ini:





**TABEL 2. 2**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA**  
**PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 KOTA PEMATANG SIANTAR**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Sesuai dengan KEPMEN 050-3708 Tahun 2020	Indikator Kinerja Prog. (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan ( s/d 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dinolkan	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	0%	0%	0%	0%	CC	C	70%
2.17.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	100%	0	0	0	0	100%	100%	100%
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	4 dok	-	-	-	0%	4 dok	4 dok	100%
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	-	-	0	0%	1 dok	1 dok	100%
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SPKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Lap	-	-	-	0%	4 Lap	4 Lap	100%

2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja, LAKIP, LPPD, LKPJ	7 Dok	-	-	0	0%	7 dok	7 dok	100%
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan PD	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan Penerimaan Gaji dan Tunjangan Aparatur PNS yang dibayarkan	49/14	-	0	-	0%	49/14	49/14	100%
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran	3 Dok	-	0	0	0%	3 Dok	3 Dok	100%
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
2.17.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	-	0	-	0%	4 paket	4 paket	100%
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	-	0	-	0%	5 paket	5 paket	100%
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	-	0	-	0%	4 paket	4 paket	100%
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	-	0	-	0%	4 paket	4 paket	100%
2.17.01.2.06.05	Penyediaan cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	-	0	-	0%	4 paket	4 paket	100%
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	-	0	-	0%	100 laporan	100 laporan	100%
2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dok	-	0	0	0%	1500 Dok	1500 Dok	100%

2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	-	0	0	0%	14 Unit	14 Unit	100%
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 laporan	-	0	0	0%	3000 laporan	3000 laporan	100%
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	-	0	0	0%	36 laporan	36 laporan	100%
2.17.01.2.08.03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	-	0	0	0%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	-	-	-	0%	72 laporan	72 laporan	100%
2.17.01.2.09	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	-	-	-	0%	10 unit	10 unit	100%
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Dipelihara	25 unit	-	-	-	0%	25 unit	25 unit	100%
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	3 unit	-	-	-	0%	3 unit	3 unit	100%

	Lainnya	Direhabilitasi								
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Meningkatnya Jumlah Koperasi Simpan Pinjam	0,64%	0%	0%	0%	0%	0,64%	0,64%	100%
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,09%	0%	0%	0%	0%	2,09%	2,09%	100%
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota	2 Koperasi	-	-	0	0%	2 Koperasi	2 Koperasi	100%
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	30%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	100%
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pematangsiantar	30%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	100%
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	112 Kop	-	-	-	0%	112 Kop	112 Kop	100%
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Meningkatnya Jumlah KSP/USP koperasi yang sehat	13,63%	0%	0%	0%	0%	13,63%	13,63%	100%

2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan kesehatan koperasi KSP dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pematangsiantar	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 unit usaha kop	-	-	0	0%	50 unit usaha kop	50 unit usaha kop	100%
2.17.05	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Meningkatnya Jumlah Koperasi yang berkualitas	21,00%	0%	0%	0%	0%	21,00%	21,00%	100%
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pematangsiantar	19%	0%	0%	0%	0%	19%	19%	100%
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	55 orang	-	-	0	0%	55 orang	55 orang	100%
2.17.05.2.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ukm yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pematangsiantar	0,42%	0%	0%	0%	0%	0,42%	0,42%	100%
2.17.05.2.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah UKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 ukm	-	-	0	0%	50 ukm	50 ukm	100%
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Persentase usaha mikro yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota Pematangsiantar	0,42%	0%	0%	0%	0%	0,42%	0,42%	100%

2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pendidikan dan pelatihan	70 Pelaku Usaha	-	-	0	0%	50 ukm	50 ukm	100%
2.17.06	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang berkualitas	2,00%	0%	0%	0%	0%	2,00%	2,00%	100%
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	0,53%	0%	0%	0%	0%	0,53%	0,53%	100%
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	13 unit usaha	-	-	0	0%	13 unit usaha	13 unit usaha	100%
2.17.06.2.01.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35 unit usaha	-	-	0	0%	35 unit usaha	35 unit usaha	100%
2.17.07	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Meningkatnya Jumlah UMKM yang difasilitasi perijinan	4,21%	0%	0%	0%	0%	4,21%	4,21%	100%
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan dan fasilitasi	1,67%	0%	0%	0%	0%	1,67%	1,67%	100%

2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dok	-	-	0	0%	1 Dok	1 Dok	100%
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah penambahan usaha mikro yang bermitra	300 UKM	-	-	0	0%	300 UKM	300 UKM	100%
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perizinan	25 unit usaha	-	-	0	0%	25 unit usaha	25 unit usaha	100%
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 unit usaha	-	-	0	0%	40 unit usaha	40 unit usaha	100%
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	40 orang	-	-	0	0%	40 orang	40 orang	100%
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Meningkatnya Jumlah UMKM Naik Kelas	8,39%	0%	0%	0%	0%	8,39%	8,39%	100%
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan usaha dari skala usaha menjadi usaha kecil	8,19%	0%	0%	0%	0%	8,19%	8,19%	100%
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	25 unit usaha	-	-	0	0%	25 unit usaha	25 unit usaha	100%
3.30.02	PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100,00%	0%	0%	0%	0%	100,00%	100,00%	100%

3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kota Pematangsiantar	20,00%	0%	0%	0%	0%	20,00%	20,00%	100%
3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 laporan	-	-	0	0%	1 laporan	1 laporan	100%
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	4 laporan	-	-	0	0%	4 laporan	4 laporan	100%
3.30.03	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	43,00%	0%	0%	0%	0%	43,00%	43,00%	100%
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola dengan baik	185 unit	0%	0%	0%	0%	185 unit	185 unit	100%
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	185 unit	-	-	0	0%	185 unit	185 unit	100%
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dok	0%	0%	0%	0%	1 Dok	1 Dok	100%
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dok	-	-	0	0%	1 Dok	1 Dok	100%
3.30.04	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan	Jumlah dokumen harga komoditas antar waktu	12	0	0	0	0	12	12	100%



	Barang Penting									
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	4 Laporan	0	0	0	0	4 Laporan	4 Laporan	100%
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	-	-	0	0%	4 Laporan	4 Laporan	100%
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/ Kota	Jumlah Laporan Harga komoditas dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	4 Laporan	0%	0%	0%	0%	4 Laporan	4 Laporan	100%
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	365 laporan	-	-	0	0%	365 laporan	365 laporan	100%
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak pada pelaku usaha distribusi barang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 laporan	-	-	0	0%	2 laporan	2 laporan	100%
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 laporan	0%	0%	0%	0%	1 laporan	1 laporan	100%
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4 laporan	-	-	0	0%	4 laporan	4 laporan	100%
3.30.05	Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan jumlah komoditas produk unggulan ekspor	0,16	0	0	0	0	0,16	0,16	100%
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan promosi dan misi	Jumlah fasilitasi promosi dan misi	3,00	0	0	0	0	3,00	3,00	100%

	<b>dagang bagi prosuk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kab/ Kota</b>	<b>dagang produk ekspor unggulan</b>								
3.30.05.2.01.02	<b>Pameran Dagang Nasional</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</b>	<b>5 pelaku usaha</b>	-	-	0	0%	<b>5 pelaku usaha</b>	<b>5 pelaku usaha</b>	<b>100%</b>
3.30.05	<b>Pengembangan Ekspor</b>	<b>Persentase pertumbuhan jumlah komoditas produk unggulan ekspor</b>	<b>0,16</b>	0	0	0	0	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>100%</b>
3.30.05.2.01	<b>Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi prosuk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kab/ Kota</b>	<b>Jumlah fasilitasi promosi dan misi dagang produk ekspor unggulan</b>	<b>3,00</b>	0	0	0	0	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>100%</b>
3.30.05.2.01.02	<b>Pameran Dagang Nasional</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</b>	<b>5 pelaku usaha</b>	-	-	0	0%	<b>5 pelaku usaha</b>	<b>5 pelaku usaha</b>	<b>100%</b>
3.30.06	<b>Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Presentase peningkatan jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah</b>	<b>70,15%</b>	0	0	0	0	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>100%</b>
3.30.06.2.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</b>	<b>Jumlah Wajib Tera Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP)</b>	<b>4781 Unit</b>	0	0	0	0	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>100%</b>
3.30.06.2.01.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang</b>	<b>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</b>	<b>3502 unit</b>	-	-	0	0%	<b>5 pelaku usaha</b>	<b>5 pelaku usaha</b>	<b>100%</b>
		<b>Pemutahiran data UTTP di Kota Pematang Siantar</b>	<b>1 Dok</b>	-	-	0	0%	<b>1 Dok</b>	<b>1 Dok</b>	<b>100%</b>
3.30.06.2.01.02	<b>Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal</b>	<b>Jumlah Dok pengawasan alat UTTP dan BDKT</b>	<b>1 DOK</b>	-	-	0	0%	<b>1 DOK</b>	<b>1 DOK</b>	<b>100%</b>
		<b>Kegiatan penyuluhan 3 M (Masyarakat melek metrologi)</b>	<b>2 kali</b>	-	-	0	0%	<b>2 kali</b>	<b>2 kali</b>	<b>100%</b>
3.30.07	<b>Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase jumlah produk usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</b>	<b>0,41%</b>	0	0	0	0	<b>0,41%</b>	<b>0,41%</b>	<b>100%</b>

3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan hasil penjualan produk unggulan	5,00%	0	0	0	0	5,00%	5,00%	100%
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	30 UMKM	-	-	0	0%	30 UMKM	30 UMKM	100%
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	5 UMKM	-	-	0	0%	5 UMKM	5 UMKM	100%
3.31.02	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industry aktif (industry skala kecil)	16,76	0	0	0	0	16,76	16,76	100%
3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	50%	0	0	0	0	50%	50%	100%
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dok	-	-	0	0%	1 Dok	1 Dok	100%
3.31.01.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan sumber daya industri	1 Dok	-	-	0	0%	1 Dok	1 Dok	100%
3.31.01.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana industri	1 Dok	-	-	0	0%	1 Dok	1 Dok	100%
3.31.01.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	-	-	0	0%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

3.31.03	Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota Pematangsiantar	100,00	0	0	0	0	100,00	100,00	100%
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah IUI, IPUI, IPKI dan IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/ Kota yang diterbitkan	4	0	0	0	0	4	4	100%
3.31.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kab/ Kota	4 Dok	-	-	0	0%	4 Dok	4 Dok	100%
3.31.04	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya data industri yang dimutakhirkan	1 Data	0	0	0	0	1 Data	1 Data	100%
3.31.04. 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Updating data IKM	1 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	100%

3.31.04. 2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dok	-	-	0	0%	1 Dok	1 Dok	100%
3.31.04. 2.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4 Dok	-	-	0	0%	4 Dok	4 Dok	100%

**1. Realisasi program/kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2022 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra perangkat daerah**

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tidak ada program tidak memenuhi target kinerja, yaitu:

**2. Realisasi program/kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra perangkat daerah**

Berdasarkan tabel realisasi program/kegiatan tahun 2022 tersebut diatas terlihat bahwa ada beberapa program/kegiatan yang telah memenuhi target yang telah direncanakan, yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan
2. Program standarisasi dan perlindungan konsumen
3. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
4. Program pendidikan dan Latihan koperasi
5. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
6. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM
8. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
9. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
10. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
11. Program pengembangan ekspor
12. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
13. Program perencanaan dan pembangunan industry
14. Program pengelolaan sistem informasi industry nasional

**3. Realisasi program/kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar tahun anggaran 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra perangkat daerah**

Berdasarkan tabel realisasi program/kegiatan tahun 2022 tersebut diatas terlihat bahwa tidak ada program/kegiatan yang telah memenuhi target yang telah direncanakan.

**4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yang direncanakan pada renstra perangkat daerah**

**5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD**

Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah:

- a. Meningkatkan produktivitas, Perindustrian dan Perdagangan secara signifikan dan berkelanjutan (sustainable);
- b. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Perindustrian dan Perdagangan dan peningkatan kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kota Pematangsiantar;
- d. Meningkatkan proporsi dari sudut jumlah usaha kecil menengah, dan usaha kecil dengan laju pertumbuhan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan jumlah unit usaha;
- e. Meningkatkan sinergi lintas pelaku dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Terwujudnya Perdagangan yang sehat yang dikelola secara profesional dan mandiri;
- g. Meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat;
- h. Meningkatkan akses perdagangan ke berbagai sumber yang dianggap produktif;
- i. Meningkatkan kelembagaan koperasi yang sehat;
- j. Memperkuat para UMKM dengan permodalan yang kuat dari koperasi dan lembaga keuangan lainnya.
- k. Meningkatkan citra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di kalangan masyarakat.

#### **6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut**

Untuk Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- a. Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas.
- b. Merencanakan target fisik dan keuangan maksimal sebanyak pada tahun sebelumnya.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan produk dalam negeri khususnya barang lokal, agar barang lokal dapat menjadi andalan daerah dan dapat bertahan sebagai produk lokal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tentang Nawacita.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Program pembangunan Kota Pematangsiantar diantaranya adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang diarahkan pada pemberdayaan rakyat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi. Pihak yang paling berperan dalam pengembangan koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan dalam pembangunan ekonomi di Kota Pematangsiantar adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Tugas yang diamanatkan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar memegang peran yang strategis dalam pemberdayaan Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan di Kota Pematangsiantar. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang ditargetkan dengan tolok ukur keberhasilan yang tercermin dalam indikator-indikator makro. Hasil-hasil pembangunan sektor koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan tercermin dari indikator makro seperti : PDRB, persen pertumbuhan koperasi, persen peningkatan kemitraan, pertumbuhan volume usaha, pertumbuhan sektor industri dan perdagangan. Secara umum hasil pelaksanaan kegiatan sektor koperasi dan UKM dalam 5 tahun terakhir ini terutama dalam Perkembangan Koperasi dan Renja Tahun 2021 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar. UKM adalah menunjukkan trend yang meningkat dengan perubahan rata-rata setiap tahunnya 2,95%. Koperasi yang aktif serta koperasi yang melaksanakan RAT mengalami penurunan, kondisi ini antara lain disebabkan kesibukan pengurus, kekurangan seriusan pengurus ataupun kekurangan kemampuan pengurus. Sektor industri mengalami peningkatan dengan bertambahnya IKM di Kota Pematangsiantar. Adanya IKM binaan menunjukkan kepedulian Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar terhadap para pengrajin dan para wirausaha baru agar lebih kreatif dan berinovasi sehingga berdaya saing. Penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi para pencari pekerjaan yang belum mendapat pekerjaan dengan memberikan pelatihan dan bantuan peralatan produktif.



Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dapat disajikan pada Tabel T-C.30 sebagai berikut:

**TABEL 2. 3**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target renstra perangkat daerah					Realisasi Capaian Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Persentase meningkatnya usaha mikro		Tersedianya data jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan asset	3,08	3,15	3,22	3,29	3,36	3,08	3,15	3,22	3,29	3,36	
2	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB		Tersedianya data kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	26,19	26,45	26,72	26,98	27,94	26,19	26,45	26,72	26,98	27,94	
3	Persentase Koperasi yang Berkualitas		Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan asset	17,33	18,67	20,00	21,33	22,93	17,33	18,67	20,00	21,33	22,93	
3	Persentase UMKM Binaan yang meningkat Omzetnya		Tersedianya data jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	40,00	45,00	50,00	60,00	70,00	40,00	45,00	50,00	60,00	70,00	
4	Persentase pengelolaan		Tersedianya data jumlah Sarana	67,00	75,00	84,00	92,00	100,00	67,00	75,00	84,00	92,00	100,00	

	sarana distribusi perdagangan		Prasarana Distribusi Perdagangan											
5	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Menengah di Kota		Tersedianya data jumlah Industri kecil di kota pematang siantar	29,00	31,00	32,00	34,00	36,00	29,00	31,00	32,00	34,00	36,00	



## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### 2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar setiap tahunnya senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam pelayanan dibidang koperasi, konsultasi industri maupun pelayanan perdagangan. Hal ini dapat dibuktikan melalui adanya peningkatan kualitas pasar, Peningkatan Usaha MikroKecil dan Menengah, Koperasi yang semakin aktif, Peningkatan Volume Koperasi, serta meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan sertifikat koperasi berprestasi baik. Untuk lebih menginsentifkan pelayanan publik, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan senantiasa melakukan koordinasi baik dengan pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

### 2.3.2. Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Adapun permasalahan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar antara lain:

**TABEL 2. 4**  
**PERMASALAHAN DAN HAMBATAN**

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Gejolak harga dan kelangkaan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya akibat wabah covid-19 menimbulkan kenaikan harga.	1. Melakukan monitoring terhadap distributor-distributor besar di Kota Pematangsiantar 2. Melakukan koordinasi terhadap daerah lain sebagai penghasil kebutuhan pokok yang langka di pasar 3. Melakukan kegiatan Pasar Murah rutin 2 kali setahun dan untuk kondisi tertentu.
2.	Kurangnya SDM pada UPTD Metrologi dan UPTD Dana Bergulir menghambat kinerja pada UPTD tersebut;	Penambahan jumlah personil dan peningkatan SDM dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan
3.	Banyaknya calon peminjam (Koperasi dan UKM) yang tidak memenuhi syarat sebagai peminjam dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang ada;	Melakukan Pembinaan bagi Koperasi dan UKM

4.	Banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif dikarenakan pengurus tidak mempunyai jiwa wirausaha, pembentukan koperasi di masa lalu yang lebih baik dikarenakan keinginan dari pemerintah (top down) bukan dari bawah (bottom down).	Penumbuhan iklim usaha yang kondusif dengan menciptakan keberpihakan dan peluang usaha sebesar-besarnya untuk mewujudkan Koperasi dan UKM menjadi lebih produktif dan berdaya asing.
5.	Masih ditemukannya barang ilegal dan barang yang mengandung bahan berbahaya beredar di masyarakat	Melakukan hubungan kerjasama dengan instansi dan kementerian terkait peredaran barang dan jasa di masyarakat

**2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional**

Program/Kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar senantiasa mendukung Program Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam mewujudkan visi dan misi. Pembinaan kewirausahaan, perkoperasian dan pelatihan industri kepada masyarakat dapat mendukung visi Walikota yakni “Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”. Pembangunan/rehabilitasi pasar tradisional diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga mendukung misi Pemerintah Kota Pematangsiantar, yakni :

1. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan Koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang berdampak masa pandemic dan atau pasca pandemic covid-19;
2. Memperkuat sentralitas dan daya Tarik kota, guna pencapaian siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara;

Kegiatan yang mendukung program pemerintah pusat, juga senantiasa menjadi perhatian pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar. Salah satu diantaranya adalah adanya kegiatan penyelenggaraan pasar murah serta pelatihan keterampilan industri rumah tangga yang ditujukan kepada masyarakat miskin/kurang mampu. Diharapkan agar kegiatan ini mampu mendukung program pengentasan kemiskinan.

#### **2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD**

Tantangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam upaya meningkatkan pelayanan SKPD antara lain :

1. Rendahnya kualitas SDM Aparatur
2. Tingginya beban kerja tidak didukung dengan jumlah aparatur
3. Semakin tingginya permintaan masyarakat untuk mendapatkan bantuan, baik modal, sarana prasarana maupun pembinaan dalam bentuk pelatihan
4. Tingginya target capaian pada RENSTRA dan RPJMD
5. Penilaian masyarakat tentang kinerja aparatur

Peluang Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar dalam upaya meningkatkan pelayanan SKPD antara lain :

1. Ketersediaan dana anggaran untuk pengembangan sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis dan pendidikan diklat
2. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kontrak kerja untuk mengukur kinerja aparatur dan bersifat mengikat
3. Adanya dukungan dana baik dari Tk. Propinsi maupun Tk. Pusat
4. Adanya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahunnya demi mendukung ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.

#### **2.4. Review Terhadap RKPD**

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebelum menentukan Program kegiatan yang akan diusulkan dalam Perincian Plafond Anggaran Sementara (PPAS), terlebih dahulu membandingkan RKPD dengan hasil musrenbang kabupaten dan berupaya menumbuhkan program kegiatan SKPD yang mampu mendukung program pemerintah pusat. Disamping itu Dinas Koperindag juga mengkaji program/kegiatan yang benar-benar paling dibutuhkan oleh masyarakat dan mendesak untuk dilaksanakan.

Proses membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilakukan agar program kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi pembangunan masyarakat pada khususnya dan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar pada umumnya.

Hasil analisis terhadap kegiatan hingga menjadi renja yang siap untuk difinalisasikan dalam RKPD tersaji pada Tabel T-C.31 berikut:

**TABEL 2. 5**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR**

NAMA SKPD: DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Keg	Indikator Keg	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>6.607.399.537</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>6.787.094.031</b>	
	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>121.200.000</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>120.000.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskopukmd ag	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	4 Dok	30.300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskopukmd ag	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	4 dok	30.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskopukmd ag	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	30.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskopukmd ag	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	30.000.000	



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskopukmd ag	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SPKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	30.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskopukmd ag	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SPKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Lap	30.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskopukmd ag	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja, LAKIP, LPPD, LKPJ	7 Laporan	30.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskopukmd ag	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja, LAKIP, LPPD, LKPJ	8 Lap	30.000.000	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>5.370.379.537</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>5.371.094.031</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskopukmd ag	Jumlah Orang/Bulan Penerimaan Gaji dan Tunjangan Aparatur PNS yang dibayarkan	50 orang/14 bulan	5.355.379.537	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskopukmd ag	Jumlah Orang/Bulan Penerimaan Gaji dan Tunjangan Aparatur PNS yang dibayarkan	50 orang/14 bulan	5.346.094.031	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/	Diskopukmd ag	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan	3 Dok	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/	Diskopukmd ag	Jumlah Dokumen	3 Dok	25.000.000	

Semesteran SKPD		semesteran				Semesteran SKPD					
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>575.230.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>580.000.000</b>		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Diskopukmd ag	Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	15.150.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Diskopukmd ag	Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	15.000.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskopukmd ag	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	90.900.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskopukmd ag	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	90.000.000		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskopukmd ag	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	18.180.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Diskopukmd ag	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	22.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskopukmd ag	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	15.150.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskopukmd ag	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	18.000.000		
Penyediaan cetak dan penggandaan	Diskopukmd ag	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	60.600.000	Penyediaan cetak dan penggandaan	Diskopukmd ag	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	60.000.000		
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Diskopukmd ag	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	100 laporan	350.000.000	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Diskopukmd ag	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 laporan	350.000.000		

			Konsultasi SKPD					SKPD			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskopukmd ag	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dok	25.250.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskopukmd ag	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dok	25.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>332.290.000</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>					<b>331.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Diskopukmd ag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 laporan	6.060.000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Diskopukmd ag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 laporan	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskopukmd ag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	45.450.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskopukmd ag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	45.000.000	
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskopukmd ag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	28.280.000	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskopukmd ag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	28.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskopukmd ag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	72 laporan	252.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskopukmd ag	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	250.000.000	

			Disediakan								
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>50.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>80.000.000</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskopukmd ag	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskopukmd ag	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit	80.000.000		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>158.300.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>305.000.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Diskopukmd ag	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	78.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Diskopukmd ag	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional	10 unit	80.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskopukmd ag	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Dipelihara	25 unit	30.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskopukmd ag	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Dipelihara	25 unit	30.000.000		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskopukmd ag	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskopukmd ag	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	195.000.000		
<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN</b>				<b>0,64%</b>	<b>32.825.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN</b>				<b>0,64%</b>	<b>50.000.000</b>

<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>2,09%</b>	<b>32.825.000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>2,09%</b>	<b>50.000.000</b>	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	P.Siantar	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota	5 KSP	32.825.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	P.Siantar	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota	5 KSP	50.000.000	
<b>Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>			<b>31%</b>	<b>37.875.000</b>	<b>Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>			<b>31%</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota</b>			<b>31%</b>	<b>37.875.000</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota</b>			<b>31%</b>	<b>50.000.000</b>	
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	P.Siantar	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta	116	37.875.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	P.Siantar	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas	116	50.000.000	

		Akuntabilitas Koperasi Kwenangan Kab/ Kota				Koperasi Kwenangan Kab/ Kota			
<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>			<b>14,28%</b>	<b>40.400.000</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>			<b>14,28%</b>	<b>50.000.000</b>
<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>100%</b>	<b>40.400.000</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kwenangan Kabupaten/Kota	P.Siantar	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	55 unit usaha kop	40.400.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kwenangan Kabupaten/Kota	P.Siantar	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	55 unit usaha kop	50.000.000
<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>			<b>22%</b>	<b>792.850.000</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>			<b>22%</b>	<b>369.370.000</b>
<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota</b>			<b>19,20%</b>	<b>505.000.000</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota</b>			<b>19,20%</b>	<b>369.370.000</b>
Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	P.Siantar	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	55 orang	505.000.000	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	P.Siantar	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	55 orang	369.370.000
<b>Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0,42%</b>	<b>202.000.000</b>					-

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	P.Siantar	Jumlah UKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 orang	202.000.000						-
<b>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota</b>			<b>0,42%</b>	<b>85.850.000</b>						
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	P.Siantar	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pendidikan dan pelatihan	70 Pelaku Usaha	85.850.000						
<b>PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>			<b>5%</b>	<b>85.850.000</b>	<b>PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>			<b>5%</b>	<b>85.000.000</b>	
<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>5%</b>	<b>85.850.000</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>5%</b>	<b>85.000.000</b>	

	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	P. Siantar	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat fasilitas dana bergulir	35 Unit Usaha	42.925.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	P. Siantar	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat fasilitas dana bergulir	35 unit usaha	50.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	P. Siantar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35 Unit Usaha	42.925.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	P. Siantar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35 unit usaha	35.000.000	
	<b>Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>			<b>4,21%</b>	<b>277.750.000</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>			<b>4,21%</b>	<b>220.000.000</b>	



<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>				<b>1,67%</b>	<b>277.750.000</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>				<b>1,67%</b>	<b>220.000.000</b>
Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	P. Siantar	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dok	55.550.000	Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	P. Siantar	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dok	50.000.000		
Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	P. Siantar	Jumlah penambahan usaha mikro yang bermitra	300 UKM	55.550.000	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	P. Siantar	Jumlah penambahan usaha mikro yang bermitra	300 UKM	50.000.000		
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	P. Siantar	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perizinan	25 unit usaha	55.550.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	P. Siantar	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perizinan	25 unit usaha	40.000.000		
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	P. Siantar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 unit usaha	55.550.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	P. Siantar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 unit usaha	40.000.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	P. Siantar	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	40 orang	55.550.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	P. Siantar	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	40 orang	40.000.000		

			Pemberdayaan Usaha Mikro					Pemberdayaan Usaha Mikro			
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>			<b>20,00%</b>	<b>126.250.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>			<b>20,00%</b>	<b>85.000.000</b>		
<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>			<b>10,00%</b>	<b>126.250.000</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>			<b>10,00%</b>	<b>85.000.000</b>		
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	P. Siantar	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	20 unit usaha	126.250.000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	P. Siantar	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	20 unit usaha	85.000.000		
<b>PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>			<b>17,07%</b>	<b>81.300.000</b>	<b>PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>			<b>17,07%</b>	<b>70.000.000</b>		
<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>100%</b>	<b>81.300.000</b>	<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>		
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	P. Siantar	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 laporan	43.300.000	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	P. Siantar	Jumlah gudang	1 laporan	40.000.000		

Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	P. Siantar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	4 laporan	38.000.000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	P. Siantar	Jumlah bahan yang di awasi	4 laporan	30.000.000		
<b>Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>				<b>57%</b>	<b>1.171.600.000</b>	<b>Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>				<b>57%</b>	<b>230.000.000</b>
<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>				<b>185 unit</b>	<b>1.010.000.000</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>				<b>185 unit</b>	<b>195.000.000</b>
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	P. Siantar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	185 unit	1.010.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	P. Siantar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	185 unit	195.000.000		
<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya</b>				<b>1 Dok</b>	<b>161.600.000</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya</b>				<b>1 Dok</b>	<b>35.000.000</b>
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	P. Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi	1 Dok	161.600.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	P. Siantar	Jumlah Gudang dan tempat penyimpanan distribusi barang yang di awasi	1 Dok	35.000.000		

			Perdagangan								
<b>Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>			<b>12</b>	<b>419.850.000</b>	<b>Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>			<b>12</b>	<b>150.000.000</b>		
<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/ Kota</b>			<b>4 Laporan</b>	<b>80.800.000</b>	<b>Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/ Kota</b>			<b>4 Laporan</b>	<b>30.000.000</b>		
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	P. Siantar	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	80.800.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	P. Siantar	Jumlah Monitoring Kebutuhan Pokok Masyarakat	4 Laporan	30.000.000		
<b>Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/ Kota</b>			<b>50 Unit Usaha</b>	<b>278.450.000</b>	<b>Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/ Kota</b>			<b>4 Laporan</b>	<b>100.000.000</b>		
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	P. Siantar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	365 laporan	101.000.000	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	P. Siantar	Jumlah Monitoring Kebutuhan Pokok Masyarakat	365 laporan	40.000.000		

	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	P.Siantar	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Monitoring Pengumpulan Informasi Barang yang dilekati cukai - Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Bersama Bea Cukai	2 laporan 4 Laporan 4 Laporan	177.450.000	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Monitoring Pengumpulan Informasi Barang yang dilekati cukai - Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Bersama Bea Cukai	P.Siantar	Jumlah Kegiatan Pasar Murah Menghadapi hari besar keagamaan	2 laporan	60.000.000		
<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>1 Laporan</b>	<b>60.600.000</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>1 laporan</b>	<b>20.000.000</b>	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	P. Siantar	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4 laporan	60.600.000	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	P. Siantar	Jumlah Monitoring Kebutuhan Pokok Masyarakat	4 laporan	20.000.000		
<b>Pengembangan Ekspor</b>				<b>0,16%</b>	<b>215.000.000</b>	<b>Pengembangan Ekspor</b>				<b>0,16%</b>	<b>250.000.000</b>	

<b>Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi prosuk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kab/ Kota</b>				<b>3</b>	<b>215.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi prosuk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kab/ Kota</b>				<b>3</b>	<b>250.000.000</b>
Pameran Dagang Nasional	Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 pelaku usaha	215.000.000	Pameran Dagang Nasional	Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 pelaku usaha	250.000.000		
<b>Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>				<b>70,15%</b>	<b>890.900.000</b>	<b>Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>				<b>70,15%</b>	<b>80.000.000</b>
<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</b>				<b>4781 Unit</b>	<b>890.900.000</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</b>				<b>4781 Unit</b>	<b>80.000.000</b>
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	P.Siantar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3502 unit	800.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	P.Siantar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3502 unit	50.000.000		
		Pemutahiran data UTTP di Kota Pematang Siantar	1 Dok	200.000.000							
Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	P.Siantar	Jumlah Dok pengawasan alat UTTP dan BDKT	1 DOK	90.900.000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	P.Siantar	Jumlah Dok pengawasan alat UTTP dan BDKT	1 DOK	30.000.000		
		Kegiatan penyuluhan 3 M (Masyarakat melek metrologi)	2 kali	80.800.000							

<b>Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>				<b>0,41%</b>	<b>197.150.000</b>	<b>Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>				<b>0,41%</b>	<b>180.000.000</b>
<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>				<b>5%</b>	<b>197.150.000</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>				<b>5%</b>	<b>180.000.000</b>
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	P.Siantar	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	30 UMKM	131.300.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	P.Siantar	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	30 UMKM	150.000.000		
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	P.Siantar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	5 UMKM	65.850.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	P.Siantar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	5 UMKM	30.000.000		
<b>Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>				<b>16,76</b>	<b>591.000.000</b>	<b>Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>				<b>16,76</b>	<b>137.905.969</b>
<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota</b>				<b>50%</b>	<b>591.000.000</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota</b>				<b>50%</b>	<b>137.905.969</b>
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	P.Siantar	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dok	174.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	P.Siantar	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dok	30.000.000		

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan sumber daya industri	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan sumber daya industri	1 Dok	5.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan sumber daya industri	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan sumber daya industri	1 Dok	25.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1 Dok	8.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1 Dok	35.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	404.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	47.905.969	
	<b>Pengendalian Izin Usaha Industri</b>			<b>100</b>	<b>55.000.000</b>	<b>Pengendalian Izin Usaha Industri</b>			<b>100</b>	<b>25.000.000</b>	
	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/ Kota</b>			<b>4</b>	<b>55.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/ Kota</b>			<b>4</b>	<b>25.000.000</b>	



	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kab/ Kota	4 Dok	55.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kab/ Kota	4 Dok	25.000.000	
	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>			<b>1 Data</b>	<b>121.200.000</b>	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>			<b>1 Data</b>	<b>50.000.000</b>	
	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>1 Dok</b>	<b>121.200.000</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>1 Dok</b>	<b>50.000.000</b>	

	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dok	65.650.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dok	25.000.000	
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4 Dok	55.550.000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	P.Siantar	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4 Dok	25.000.000	
<b>SUBTOTAL</b>						<b>11.744.199.537</b>				<b>8.869.370.000</b>	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam proses penganggaran, tentunya banyak usulan-usulan yang menyangkut kepentingan kelompok tertentu, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, usulan SKPD Pemerintah Kota kepada SKPD Tk. Propinsi, dll. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Pemberian pelatihan kepada masyarakat
2. Pemberian bantuan sarana dan prasarana perdagangan
3. Pemberian bantuan sarana perindustrian
4. Pemberian bantuan modal kepada masyarakat, koperasi dan UMKM

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Pematangsiantar dapat di sajikan pada tabel T-C.32 di bawah ini:

**TABEL 2. 6**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN 2024**  
**KOTA PEMATANG SIANTAR**

**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b> 1	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b> Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kec. Siantar Marimbun, Siantar Timur, Siantar Marihat, Siantar Barat, Siantar Sitalasari	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan Perkoperasian	50 orang	<b>Musrenbang</b>
<b>II</b> 2	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b> Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Kec. Siantar Martoba, Siantar Barat, Siantar Marihat, Siantar Timur, Siantar Utara, Siantar Sitalasari, Siantar Selatan	Fasilitasi pelatihan manajemen UMKM	50 orang	<b>Musrenbang</b>
<b>III</b> 3	<b>Program Pengembangan UMKM</b> Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Kec. Siantar Martoba, Siantar Barat, Siantar Marihat, Siantar Timur, Siantar Utara, Siantar Sitalasari, Siantar Selatan	Fasilitasi bantuan peralatan untuk UMKM	50 orang	<b>Musrenbang</b>

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan daya saing UMKM yang berkaitan dengan misi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui perbaikan produktivitas dan nilai tambah produk khususnya bagi usaha mikro yang sebagian besar mencakup masyarakat berpendapatan rendah. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, serta perkembangan usahanya secara berkelanjutan.

Di sisi lain, peningkatan daya saing UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui fasilitasi bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Fasilitasi tersebut dapat mencakup peningkatan inovasi, penerapan standardisasi dan sertifikasi kualitas proses produksi dan produk, dan peningkatan jangkauan pasar, termasuk ekspor. UMKM juga dapat diperkuat perannya di pasar domestik melalui penurunan biaya transaksi dan promosi penggunaan produk dalam negeri.

Khusus untuk peningkatan daya saing koperasi, upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu mendorong koperasi menjadi lebih mandiri melalui peningkatan dan penguatan partisipasi anggota koperasi untuk mengembangkan usaha bersama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran koperasi sebagai wadah bagi penciptaan efisiensi usaha, peningkatan posisi tawar, dan peningkatan jangkauan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Dampak yang diharapkan yaitu peningkatan kesejahteraan anggota koperasi baik secara ekonomi maupun sosial yang selanjutnya akan berkontribusi pada pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan. Selain itu, perbaikan kinerja usaha anggota koperasi juga diharapkan dapat mendorong kemandirian koperasi yang berlanjut pada peningkatan daya saing koperasi.

Selain peningkatan partisipasi anggota, koperasi juga perlu diperkuat kelembagaannya. Hal ini dapat dilakukan melalui modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi sehinggadapat merespon perubahan pasar dengan cepat. Koperasi juga dapat diperkuat manajemennya untuk menjadi

pengelola sentra dan organisasi klaster. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga perlu diperkuat melalui perluasan keterlibatan UMKM dan koperasi dalam jaringan produksi dan pemasaran, baik regional, nasional maupun internasional.

Perbaikan tata kelola dan kinerja kelembagaan UMKM dan koperasi menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan peluang pengembangan kemitraan, termasuk yang berbasis inovasi, investasi dan ekspor. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga diharapkan dapat berdampak pada perbaikan struktur pelaku usaha di Indonesia, terutama untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini penting untuk mengoptimalkan pengembangan bidang-bidang usaha tertentu yang akan lebih efisien untuk dijalankan dalam skala kecil dan menengah. UKM juga memiliki kapasitas yang lebih baik dibandingkan dengan usaha mikro terutama dalam merespon peluang investasi, kemitraan atau kerja sama usaha, dan perbaikan peraturan, serta perubahan pasar yang dinamis.

Penguatan UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya tenaga kerja yang ada secara optimal. Dalam hal ini, UKM dapat menjadi avalis atau offtaker bagi usaha mikro yang mendominasi populasi pelaku usaha di sektor-sektor primer, serta memfasilitasi pengolahan produk primer menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Peningkatan kapasitas UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dunia usaha dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan keterbukaan dan peningkatan persaingan pasar. Berbagai upaya penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan RPJMN 2022-2027 yang berfokus pada pencapaian daya saing kompetitif berdasarkan kemampuan sumber daya alam, SDM dan Iptek.

Kerangka kebijakan yang digunakan dapat dirangkum dalam suatu skenario peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima tahun ke depan seperti diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberdayaan UMKM diarahkan untuk meningkatkan skala UMKM dalam rangka penguatan pasar domestik dan pengembangan keunggulan global. Kebijakan difokuskan pada upaya-upaya:

- a. peningkatan produktivitas UMKM terutama berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya.
  - b. peningkatan inovasi dan penerapanstandarisasi proses produksi dan produk/jasa UMKM;
  - c. peningkatan kapasitas kelembagaan usaha melalui penguatan kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok; dan
  - d. peningkatan jangkauan pemasaran produk dan jasa UMKM;
2. Kebijakan pemberdayaan koperasi diarahkan untuk meningkatkan tata kelola usaha koperasi yang difokuskan pada upaya-upaya:
- a. peningkatan dan penguatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan
  - b. modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk berperan secara optimal dalam pasar domestik dan internasional.

Skenario kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi ke depan juga disusun berdasarkan potensi yang dimiliki oleh UMKM dan koperasi. Potensi terbesar UMKM saat ini yaitu populasinya yang besar, serta karakteristik organisasi dan usahanya yang fleksibel. Populasi UMKM yang besar merupakan modal untuk berkontribusi pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan skala produksi dan pemasaran. Fleksibilitas organisasi, tata kerja dan pengelolaan usaha UMKM juga memberi kemudahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Kapasitas Rancangan Teknokratik RPJMN 2016-2021, UMKM umumnya dibangun dari sumber daya lokal (bahan baku, pengetahuan, keterampilan, dan tenaga kerja) juga menjadikan usahanya dapat menghasilkan produk yang terjangkau bagi masyarakat. Potensi tersebut menjadikan UMKM dapat berkontribusi besar dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Sementara itu sebagai organisasi yang berbasis anggota, koperasi dapat menggunakan kekuatan partisipasi anggotanya untuk membangun kemandirian dan kemajuan usaha. Koperasi juga dapat mengembangkan skala yang memadai untuk UMKM yang bergabung menjadi anggotanya. Cara ini akan memungkinkan koperasi untuk meningkatkan efisiensi usaha bersama mulai dari pengadaan, produksi sampai pemasaran. Dengan misi ekonomi dan

sosialnya, koperasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan modal sosial masyarakat serta kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pengembangan UMKM dan koperasi juga didukung ketersediaan payung hukum, sumber daya alam dan SDM. Struktur peraturan yang ada sudah memberikan koridor yang jelas mengenai penyediaan dukungan bagi perkembangan UMKM dan koperasi ke depan. Ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk yang besar) juga menjadi faktor eksternal pendukung bagi perkembangan UMKM. Adanya budaya gotong-royong juga menjadi cikal bakal bagi perkembangan koperasi. Potensi UMKM dan koperasi juga dapat dilihat dari adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait pengembangan usaha baru dan penguatan UMKM dan koperasi di berbagai sektor dan wilayah.

Namun efektivitas penggunaan berbagai potensi dan sumber daya tersebut masih membutuhkan penanganan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi. beberapa permasalahan umum yang perlu dicermati adalah sebagai berikut:

1. Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro yang informal dan memiliki akses ke sumber daya, kapasitas SDM, serta kontribusi yang terbatas;
2. Penurunan kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) di sektor-sektor dengan jumlah UMKM yang besar yaitu sektor perindustrian dan perdagangan. Kondisi ini juga menunjukkan kontribusi UMKM dalam meningkatkan nilai tambah di sektor-sektor produktif masih rendah;
3. Populasi dan kontribusi PDB usaha kecil dan menengah yang rendah mengkonfirmasi masalah missing middle dalam struktur pelaku usaha;
4. Kesenjangan yang melebar antara produktivitas per unit UMKM dan usaha besar, dan antar UMKM di berbagai sektor;
5. Kontribusi UMKM dalam investasi masih lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar; dan
6. Koperasi belum berperan optimal dalam peningkatan efisiensi dan posisi tawar anggotanya.

Keenam permasalahan tersebut perlu ditangani secara komprehensif dengan memperhatikan masalah-masalah spesifik terkait SDM, produksi dan pemasaran, pembiayaan, kelembagaan dan iklim usaha.



## **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

### **3.2 .1. Tujuan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar seperti yang dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Rumusan tujuan tersebut adalah Sektor perdagangan, sektor perindustri memberikan kontribusi meningkatnya PDRB, UMKM yang berdaya saing dan Koperasi yang mandiri

### **3.2.2. Sasaran**

1. Meningkatnya pemberdayaan industri melalui peningkatan nilai tambah produk IKM;
2. Meningkatnya kinerja perdagangan daerah;
3. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha;
4. Meningkatnya jumlah koperasi aktif.

## **3.3. Program dan Kegiatan**

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam rumusan program dan kegiatan untuk Tahun anggaran 2022, tentunya tidak lepas dari Program/kegiatan yang telah direncanakan pada RENSTRA Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang disinkronisasikan dengan hasil musrembang Kec/Kel. Disamping itu Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan juga mengacu pada Program kerja Pemerintah Pusat agar mengedepankan Program kegiatan yang mampu menanggulangi pengentasan kemiskinan serta pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Diharapkan program kegiatan yang direncanakan ini mampu mendukung tercapainya visi misi Kepala Daerah Kota Pematangsiantar. Jumlah Program yang akan dilaksanakan sebanyak 12 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 20 Kegiatan. Kegiatan ini diperkirakan akan membutuhkan biaya sebesar Rp. 13.245.841.126,- yang berasal dari dana APBD Kota, Rp. 11.245.841.126,- sumber dana APBN sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Program kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
  - Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/ kota
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
  - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota.
4. Program Penilaian KSP/ USP Koperasi
  - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah KEanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kab/ Kota.
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
  - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/ Kota.
  - Pendidikan dan Latihan UKM dalam Daerah KAB/ Kota
  - Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) daerah kab/ kota
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
  - Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kab/ kota.
7. Program Pengembangan UMKM
  - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
8. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
  - Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
9. Program Penunjang urusan pemerintahan

- Administrasi kepegawaian perangkat daerah
10. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
    - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat DAerah Kab/ Kota
  11. Program Sarana Distribusi Perdagangan
    - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi
    - Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
  12. Program Stabilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
    - Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kab/ kota
    - Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kab/ Kota
    - Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kab/ kota
  13. Program Pengembangan Ekspor
    - Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kab/ Kota
  14. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
    - Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
  15. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
    - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/ Kota
  16. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
    - Penyediaan informasi industry untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/ Kota
  17. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
    - Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
  18. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
    - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan KAb/ Kota

Tabel Rencana Program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**RENCANA KERJA**

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTARKOTA PEMATANGSIANTAR**

**TAHUN 2024**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR						8.869.370.000,00								9.961.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.696.464.031,00								8.336.500.000,00	
	2	1					7.696.464.031,00								8.336.500.000,00		
	2	1	0				6.787.094.031,00							BPredikat	7.156.500.000,00		
	2	1	0	2.			100%							BPredikat	140.000.000,00		
	2	1	0	2.	01		100%	120.000.000,00						BPredikat	140.000.000,00		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	100%			100%	120.000.000,00					Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Renstra, Renja, RKA, LKPJ, LPPD, Lakip	100%	140.000.000,00	

2	1	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	7	1	01	01		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	30.000.000,00	- Kota Pematangi antar, Siantar Barat, Simarito	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Renstra, Renja, RKA, LKPJ, LPPD, Lakip	4 Dokumen	35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATAN G SIANTAR
2	1	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
	7	1	01	02		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	- Kota Pematangi antar, Siantar Barat, Simarito	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Renstra, Renja, RKA, LKPJ, LPPD, Lakip	1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATAN G SIANTAR
2	1	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
	7	1	01	06		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Laporan			4 Laporan	30.000.000,00	- Kota Pematangi antar, Siantar Barat, Simarito	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Renstra, Renja, RKA, LKPJ, LPPD, Lakip	4 Laporan	35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATAN G SIANTAR



						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan			3 Laporan	25.000.000,00	- Kota Pematangsiantar, Siantar Barat, Simarito	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial KemasyarakatanMeningkatnya akuntabilitas kinerja	ASN, Laporan Keuangan	3 Laporan	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATAN G SIANTAR
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD	100%			100%	580.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	ASN	100%	631.000.000,00	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	15.000.000,00	- Kota Pematangsiantar, Siantar Barat, Simarito	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	ASN	4 Paket	16.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATAN G SIANTAR
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	90.000.000,00	- Kota Pematang Siantar, Siantar Barat, Simarito	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	ASN	5 Paket	95.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG Siantar	
2	1	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
7	1	06	03			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	22.000.000,00	- Kota Pematang Siantar, Siantar Barat, Simarito	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	ASN	4 Paket	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG Siantar	
2	1	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
7	1	06	04			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	18.000.000,00	- Kota Pematang Siantar, Siantar Barat, Simarito	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	ASN	4 Paket	18.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG Siantar	
2	1	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
7	1	06	05																	



						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	60.000.000,00	- Kota Pematangsiantar, Siantar Barat, Simarito	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	ASN	4 Paket	65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATAN G SIANTAR	
2	1	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
7	1		06	09		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan			100 Laporan	350.000.000,00	- Kota Pematangsiantar, Siantar Barat, Simarito	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	ASN	100 Laporan	380.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATAN G SIANTAR	
2	1	0	2.	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
7	1		06	10		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1700 Dokumen			1500 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Pematangsiantar, Siantar Barat, Simarito	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	ASN	1650 Dokumen	27.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATAN G SIANTAR	
2	1	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	100%			100%	80.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan	ASN	100%	190.000.000,00		
7	1		07																	



						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			36 Laporan	45.000.000,00	- Kota Pematangantar, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	ASN, THL	36 Laporan	47.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATAN G SIANTAR
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			0 Laporan	28.000.000,00	- Kota Pematangantar, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	ASN, THL	4 Laporan	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATAN G SIANTAR
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan			72 Laporan	250.000.000,00	- Kota Pematangantar, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	ASN, THL	72 Laporan	265.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATAN G SIANTAR

2	1	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100%	305.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	ASN	100%	314.000.000,00	
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			10 Unit	80.000.000,00	- Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	ASN	10 Unit	85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR
2	1	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit			25 Unit	30.000.000,00	- Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	ASN	25 Unit	34.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR
2	1	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			1 Unit	195.000.000,00	- Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Sosial Kemasyarakatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja	ASN	1 Unit	195.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMANTASANTAR	
2	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Meningkatnya Jumlah Koperasi Simpan Pinjam	1,94%		0,97%	50.000.000,00							1,62%	70.000.000,00	
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,76%		2,51%	50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Koperasi Simpan Pinjam	3,34%	70.000.000,00		
	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	8 Unit Usaha			2 Unit Usaha	50.000.000,00	- Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Koperasi Simpan Pinjam	7 Unit Usaha	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMANTASANTAR	





5	2	1	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	% Meningkatnya Jumlah Koperasi yang berkualitas [deleted] % Meningkatnya Jumlah Koperasi yang berkualitas Persentase Meningkatnya Jumlah Koperasi yang berkualitas	25%			22 % 22 % 22 %	369.370.000,00					24%	500.000.000,00		
	2	1	0	2.		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/ Kota	42,60%			40,9 4 %	369.370.000,00			Memper kuat Ketaha nan Ekono mi Untuk Pertum buhan Yang Berkual itas dan Berkeadila	Peningkatan Pertumbuha n Ekonomi Inklusif Meningkatny a kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Koperasi	42,18%	500.000.000,00	
	2	1	0	2.	00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasia n	205 Orang			55 Ora ng	369.370.000,00	- Kota Pemat angsi antar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER KHUSU S-DANA ALOKA SI KHUSU S NON FISIK	Memper kuat Ketaha nan Ekono mi Untuk Pertum buhan Yang Berkual itas dan Berkeadila	Peningkatan Pertumbuha n Ekonomi Inklusif Meningkatny a kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Koperasi	195 Orang	500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGA H DAN PERDAGA NGAN KOTA PEMATAN G SIANTAR



6	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan volume usaha koperasi [deleted] [deleted] Persentase peningkatan volume usaha koperasi	3,5%			2 % 2 %	85.000.000,00			dilan		3%	100.000.000,00		
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	10,68%			10,25 %	85.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Koperasi	10,56%	100.000.000,00	
	2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga			35 Keluarga	35.000.000,00	- Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Koperasi	50 Keluarga	40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR	

	2	1	0	2.	00	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha													
		7	6	01	05		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			13 Unit Usaha	50.000.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Koperasi		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR
7	2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	[deleted] Persentase pelaku usaha mikro baru yang berizin [deleted] Persentase pelaku usaha mikro baru yang berizin	6%		3 % 3 %	220.000.000,00						5%	265.000.000,00	
	2	1	0	2.		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan dan fasilitasi	1,6%		0,8 %	220.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Usaha Mikro	1,33%	265.000.000,00	

	2	1	0	2.	00	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
		7	7	01	02		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	220 Unit Usaha			300 Unit Usaha	50.000.000,00	- Kota Pematangi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Usaha Mikro	220 Unit Usaha	60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR
	2	1	0	2.	00	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
		7	7	01	03		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha			25 Unit Usaha	50.000.000,00	- Kota Pematangi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA-UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Usaha Mikro	27 Unit Usaha	60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR
	2	1	0	2.	00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
		7	7	01	04		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	30 Unit Usaha			40 Unit Usaha	40.000.000,00	- Kota Pematangi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Usaha Mikro	25 Unit Usaha	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR

	2	1	0	2.	00	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														
		7	7	01	05		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50 Orang			40 Orang	40.000.000,00	- Kota Pematangi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Usaha Mikro	45 Orang	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR
	2	1	0	2.	00	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
		7	7	01	14		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata			500 Unit Usaha	40.000.000,00	- Kota Pematangi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Usaha Mikro		45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR	
8	2	1	0	2.		PROGRAM PENGEMBA NGAN UMKM	Persentase Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wirausaha Persentase Jumlah UMKM binaan yang meningkat omsetnya	12,66%			11,93% 45%	85.000.000,00						12,41%	90.000.000,00	
	2	1	0	2.		Pengembang an Usaha Mikro dengan	Persentase peningkatan usaha dari skala usaha	16%			10%	85.000.000,00			Memperkuat Ketahanan	Meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor	UMKM	14%	90.000.000,00	



					Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kota Pematangsiantar						itas dan Berkeadilan						
3	302	206	0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya														
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 Laporan			1 Laporan	40.000.000,00	- Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Pedagang	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR
3	302	206	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	4 Laporan			4 Laporan	30.000.000,00	- Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Pedagang	4 Laporan	35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR

10	3	3	0			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%			57%	230.000.000,00					86%	290.000.000,00		
	3	3	0	2.		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola dengan baik	7Jumlah			4 Jumlah	195.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Pasar	6Jumlah	250.000.000,00	
	3	3	0	2.	00	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
	0	0	3	01	01		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit			30 Unit	195.000.000,00	- Kota Pematangsi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Pasar	1 Unit	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATAN G SIANTAR
	3	3	0	2.		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1Dokumen			1 Dokumen	35.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Pedagang	1Dokumen	40.000.000,00	





						Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan			4 Laporan	30.000.000,00	- Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Masyarakat	4 Laporan	35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMANTANG SIANTAR
	3	304	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	4Laporan			-	100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Masyarakat	4Laporan	120.000.000,00	
	3	304	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	365 Laporan			4 Laporan	40.000.000,00	- Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Masyarakat	365 Laporan	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMANTANG SIANTAR	

	3	3	0	2.	00	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
		0	4	02	03		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan			365 Laporan	60.000.000,00	- Kota Pematangi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Masyarakat	2 Laporan	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR
	3	3	0	2.		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pupuk yang disalurkan	0,047%			0,044%	20.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Distributor Pupuk	0,046%	30.000.000,00	
	3	3	0	2.	00	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
		0	4	03	03		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan			4 Laporan	20.000.000,00	- Kota Pematangi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Distributor Pupuk	4 Laporan	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR

12	3	305			PROGRAM PENGEMBA NGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan jumlah komoditas produk unggulan ekspor	18,21%			17,16%	250.000.000,00					17,86%	300.000.000,00		
	3	305	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Promosi dan misi dagang produk ekspor unggulan	3kali			3 kali	250.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	UMKM	3kali	300.000.000,00	
	3	305	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional														
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha			5 Pelaku Usaha	250.000.000,00	- Kota Pematangi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	UMKM	5 Pelaku Usaha	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR
13	3	306			PROGRAM STANDARDI SASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase peningkatan jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang	70,65%			70,26%	80.000.000,00						70,35%	100.000.000,00	



14	3	3	0			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Jumlah produk usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,51%			0,43 %	180.000.000,00					0,5%	290.000.000,00		
	3	3	0	2.		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase produk unggulan yang difasilitasi pemasaran	7,9%			6,5 %	180.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	UMKM	7,4%	290.000.000,00	
	3	3	0	2.	00	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota				20 UM KM	150.000.000,00	- Kota Pematangi antar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	UMKM		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATAN G SIANTAR
	3	3	0	2.	00	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														

							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				5 UM KM	30.000.000,00	- Kota Pemat angsi antar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	Memper kuat Ketaha nan Ekono mi Untuk Pertum buhan Yang Berkuat itas dan Berkea dilan	Peningkatan Pertumbuha n Ekonomi Inklusif Meningkatny a kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	UMKM		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGA H DAN PERDAGA NGAN KOTA PEMATAN G SIANTAR	
	3	3	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					212.905.969,00								375.000.000,00	
1 5	3	3	0			PROGRAM PERENCANA AN DAN PEMBANGU NAN INDUSTRI	Persentase pertumbuha n industri aktif (industri skala kecil)	17,78%			16,9 7 %	137.905.969,00							17,71%	250.000.000,00	
	3	3	0	2.		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembanguna n Industri Kabupaten/ Kota	Persentase terselesaikan nya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkanny a menjadi PERDA	100%			40 %	137.905.969,00			Memper kuat Ketaha nan Ekono mi Untuk Pertum buhan Yang Berkuat itas dan Berkea dilan	Peningkatan Pertumbuha n Ekonomi Inklusif Meningkatny a kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	RPIK	80%	250.000.000,00		
	3	3	0	2.	00	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Rencana Pembanguna n Industri	1 Dokum en			1 Dokum en	30.000.000,00	- Kota Pemat angsi antar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	Memper kuat Ketaha nan Ekono mi Untuk Pertum buhan Yang Berkuat itas dan Berkea dilan	Peningkatan Pertumbuha n Ekonomi Inklusif Meningkatny a kontribusi UMKM dan sektor unggulan	RPIK	1 Dokum en	80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGA H DAN PERDAGA NGAN KOTA	



							dan Peran Serta Masyarakat				Semua Kel/Desa		Yang Berkualitas dan Berkeadilan	daerah				PEMATANG SIANTAR			
16	3	313	03				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota Pematangsiantar	100%			100%	25.000.000,00				100%	45.000.000,00			
	3	313	03	2.01			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	7Jumlah			-	25.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Industri	6Jumlah	45.000.000,00	
	3	313	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota															



						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota			4 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Industri		45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR
17	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya data industri yang dimutakhirkan	1Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1Dokumen	80.000.000,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Updating data IKM	1Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Industri	1Dokumen	80.000.000,00	





## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan pemerintah kota. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 disajikan pada Tabel T-C.33. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Selain itu, pada Tabel T-C.33 disajikan pula program prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2024.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar yang mendukung sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar pada misi pembangunan daerah nomor 4 yaitu Memperkuat Sistem Ekonomi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi antara lain:

1. Sumber Dana DAK : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.

2. Sumber Dana DAK- : Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Non Fisik perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi.
3. Sumber Dana DAU : Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/ Kota, Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi, Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota, Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro, Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran serta Desain dan Teknologi, Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang, Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

## **BAB IV P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rancangan Renstra 2022-2027 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemko Pematangsiantar serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Tahun 2024. Sebagai turunan Renstra, Renja ini secara khusus menerjemahkan dan menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan pembangunan jangka pendek di bidang koperasi dan UMKM.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan, ditingkat Provinsi maupun Kab/ Kota. Selain itu, Renja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan nasional yang diambil oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Masukan dari berbagai pemangku kepentingan (kecamatan dan kelurahan) dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024 juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja ini. Nilai anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Pematangsiantar maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Demikian renja ini disusun dan semoga bermanfaat untuk membina kelompok usaha kecil, menengah dan besar. Untuk perbaikan dan penyempurnaan rencana ini kami mengharapkan bantuan berupa saran dan masukan dan diucapkan terima kasih.

Pematangsiantar, Mei 2023  
Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan  
Perdagangan Kota Pematangsiantar

**HERBET ARUAN, S.Pd., MH**  
**Nip. 19710215 199305 1 001**

# **LAMPIRAN**